

## PKM Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi

Eva Meizara Puspita Dewi<sup>1</sup>, Amirah Aminaty Agussalim<sup>2</sup>, Basti Tetteng<sup>3</sup>,  
Mega Rezkyta Putri<sup>4</sup>, Asmiati<sup>5</sup>

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [eva.meizara@unm.ac.id](mailto:eva.meizara@unm.ac.id)

**Abstrak:** Setiap warna negara berhak untuk menerima pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang layak. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang inklusi telah diamanatkan melalui *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya yang menerima penyandang Disabilitas wajib melakukan langkah-langkah untuk memberikan akomodasi yang layak kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, masih sedikit Perguruan Tinggi yang sudah betul-betul memberikan layanan inklusif untuk mahasiswa disabilitas khususnya di Indonesia Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Perguruan Tinggi terkait untuk menjadi narasumber dan memaparkan materi terkait Pendidikan Inklusi. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 88 orang, yang terdiri dari dosen, mahasiswa, masyarakat umum yang berasal dari seluruh Indonesia. Data pada kegiatan ini diperoleh dari hasil pre-test dan post test yang telah diisi oleh para peserta, serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan paired sampel t test. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para peserta dalam kegiatan ini mengalami peningkatan pengetahuan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusi, Perguruan Tinggi

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yang berarti bahwa semua warga negara berhak menerima pendidikan, termasuk diantaranya penyandang disabilitas. Adapun wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang layak adalah melalui pendidikan inklusi.

Amalia (2022) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan sama. Menurut Maris dan Rahmi (2022) pendidikan inklusi merupakan tempat semua individu, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam kelas reguler dengan tetap menerima dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan dan aksesibilitas terhadap informasi dan lingkungan

sekitarnya. Muhibbin (2021) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi merupakan tempat mahasiswa difabel untuk dapat belajar, berpartisipasi dan dipandang sebagai individu yang bernilai dalam universitas.

Gagasan mengenai pendidikan inklusi ini sendiri dimulai dari Konferensi Dunia UNESCO tahun 1994 di Spanyol. Konferensi ini selanjutnya mengarahkan untuk berkembangnya bidang kebutuhan khusus dalam upaya internasional untuk menjamin hak semua individu (Ainscow, 2002). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang Inklusif telah diamanatkan melalui *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) dan berbagai aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah Indonesia.

Menurut Sastradiharja, Farizal dan Sutarya (2020) pendidikan inklusi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan bagi segenap elemen bangsa, karena keberadaan warga negara berkebutuhan khusus merupakan tanggung jawab bersama. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pasal 10 bagian a menyebutkan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, yaitu "mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus". Pada Pasal 40 ayat (1) juga menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 40 ayat (2) juga menyebutkan bahwa "penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus".

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang disabilitas. Pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah". Pada ayat (2) juga menjelaskan bahwa "Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, baik secara inklusif maupun khusus.

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas, dapat diketahui perlunya pemberian layanan pendidikan yang inklusi untuk peserta didik penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya yang menerima penyandang Disabilitas wajib melakukan berbagai upaya untuk memberikan akomodasi yang layak kepada mahasiswa penyandang Disabilitas.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri penerapan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi menuai banyak tantangan. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh Muhibbin (2021) mengenai tantangan pendidikan inklusi diidentifikasi tiga tantangan dalam penerapan pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Data tersebut berdasarkan penerapan pendidikan inklusi di dua universitas yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya. Tiga tantangan yang dimaksud adalah paradigma masyarakat, SDM dan manajemen pembelajaran, serta aksesibilitas untuk fasilitas kampus. Pendidikan Tinggi di Indonesia Timur sendiri khususnya di Sulawesi Selatan belum ada yang menerapkan prinsip pendidikan inklusi secara menyeluruh meskipun telah menerima mahasiswa disabilitas. Sementara itu, kebutuhan aksesibilitas pendidikan tinggi oleh mahasiswa disabilitas cukup mendesak untuk diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, membuat tim peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya forum yang dapat mewadahi *sharing* pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi khususnya menyoar penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia Timur. Forum ini bertujuan untuk memahami tantangan apa saja yang dihadapi Universitas-universitas yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan pendidikan inklusi sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan dapat mempersiapkan dan berbenah diri untuk menerapkan pendidikan inklusi. Oleh karena itu, tim peneliti kemudian menggandeng mitra yang memiliki fokus yang sama yaitu bidang pendidikan untuk menyelenggarakan forum tersebut, yaitu Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI) Wilayah Sulawesi atau disingkat APPI Sulawesi.

APPI Sulawesi merupakan asosiasi yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi secara optimal melalui pendidikan. APPI Sulawesi merupakan perpanjangan tangan APPI Pusat untuk Provinsi di Wilayah Sulawesi. Sejak berdiri tahun 2020, APPI Sulawesi aktif melakukan edukasi, penelitian, dan pengabdian mengenai isu-isu pendidikan kepada masyarakat. Salah satu fokus APPI Sulawesi adalah memberikan edukasi mengenai individu dengan kebutuhan khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Namun demikian, APPI Sulawesi belum pernah melakukan kajian mengenai Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi sebelumnya. APPI Sulawesi sendiri menargetkan untuk dapat mendukung terwujudnya pendidikan inklusi mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal tersebut yang membuat Mitra ingin bekerjasama untuk melaksanakan satu bentuk edukasi yang menyoar *stakeholder* untuk sama-sama mengkaji Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi. Sebagai langkah awal dalam memahami dan membangun kesadaran masyarakat umum, penyelenggara Pendidikan Tinggi, hingga pemerintah mengenai Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, diangkatlah tema mengenai Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi, dan menghasilkan judul kegiatan "PKM Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan PKM Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2023. Kegiatan ini dilakukan secara *blended*, yaitu daring melalui *virtual zoom meeting*, dan luring di Ruang Senat Fakultas Psikologi UNM. Kegiatan ini diikuti oleh 88 peserta yang terdiri Dosen, Mahasiswa, dan masyarakat umum yang berasal dari seluruh Indonesia. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan persiapan kegiatan yang dimulai dengan diskusi bersama mitra yakni APPI Pusat dan wilayah Sulawesi Selatan tentang permasalahan yang dihadapi ketika menerapkan pendidikan inklusi di perguruan tinggi;
- b. Mencari anggota tim yang kompeten, bersedia dan memiliki komitmen dalam pelaksanaan kegiatan ini;
- c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti literatur berbentuk buku dan jurnal yang digunakan untuk membantu menyusun *guide* wawancara, serta tempat untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Merekrut mahasiswa yang berminat membantu dalam kegiatan ini;
- e. Menyiapkan instrument *pre-test* dan *post-test*;
- f. Menyiapkan form pendaftaran yang bersedia untuk hadir dan *sharing session* atas pengalamannya dalam menjalankan pendidikan Inklusi;
- g. Menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan dan zoom untuk peserta dari Jawa;
- h. Pelaksanaan kegiatan;
- i. Melakukan analisis data dan evaluasi pelaksanaan.

Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif dan uji *Paired Sample t-test*. Menurut Isjianto (2005) analisis deskriptif adalah kegiatan mengubah kumpulan data mentah menjadi gambaran atau bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, Prameswari dan Rahayu (2020) mengemukakan bahwa *uji paired sample t-test* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

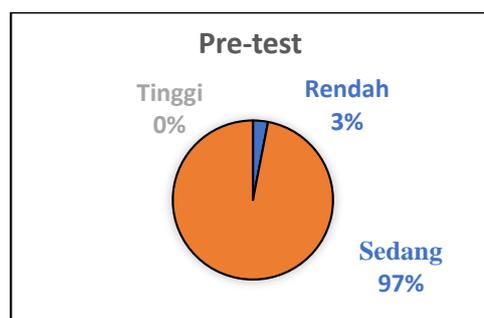
Data penelitian ini diperoleh dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah diisi partisipan sebelum dan setelah pelatihan. Dari 88 peserta yang mengikuti kegiatan ini, hanya 33 orang yang berkomitmen untuk mengisi *pre-test* dan *post-test* secara lengkap. Analisis Deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran dari kelompok data seperti, rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Berikut merupakan hasil dari analisis deskriptif yang didapatkan:

**Tabel 1.** Hasil Analisis Deskriptif

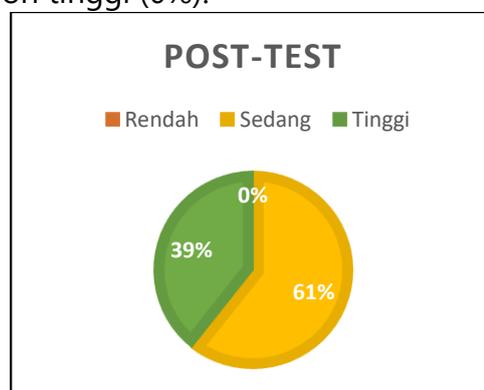
	N	Min.	Max.	Mean	SD
<b>Pre-test</b>	33	0	8	5,18	1,509
<b>Post-test</b>	33	4	8	6,39	1,144

Hasil pengukuran *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angka di tiap hasil analisis deskriptif.

Pada *pre-test* skor minimum partisipan sebesar 0 sedangkan pada *post-test* skor minimum partisipan menjadi 4. Pada skor maksimum tidak terjadi penurunan atau peningkatan dengan skor 8. Skor rata-rata mengalami peningkatan dari *pre-test* ke *post-test*, dari rata-rata 5,18 pada *pre-test* menjadi 6,39 pada *post-test*.

**Gambar 1.** Kategorisasi skor pre-test

Hasil *pre-test* partisipan penelitian menunjukkan bahwa skor dengan kategori sedang menjadi mayoritas hasil *pre-test* kegiatan dengan jumlah sebesar 32 orang (97%), partisipan dengan skor rendah dengan jumlah sebesar 1 orang (3%) dan tidak ada yang memiliki kategori tinggi (0%).

**Gambar 2.** Kategorisasi skor post-test

Hasil *post-test* partisipan penelitian menunjukkan mayoritas partisipan dengan skor sedang sebanyak 20 orang (60%), sedangkan peserta dengan kategori tinggi sebanyak 13 orang (30%). Tidak ada atau 0% peserta yang memperoleh skor rendah.

**Tabel 1.** Hasil uji Paired Sampel t-test

	Paired Differences							
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1								
Pre-Test	-							
Post-Test	1.21	1.111	.193	-1.606	-.818	6.266	32	.000

Berdasarkan hasil uji *Paired Sample t-test* dari pre-test dan post-test di atas, diperoleh nilai  $t = -6.266$  dengan nilai sig 0.000 artinya  $p < 0.01$ , yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test*. Selisih mean antara skor *pre-test* dan *post-test* adalah sebesar -1.212, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada skor *post-test* peserta kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan.

Adapun metode intervensi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menghadirkan beberapa narasumber yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Perguruan Tinggi terkait, untuk menjadi narasumber dan memaparkan materi terkait Pendidikan Inklusi. Pelaksanaan kegiatan di hari pertama, *Opening Ceremony* dipandu oleh Muh. Irsyad, S.Psi, pengantar dari Ketua Pelaksana kegiatan oleh Eva Meizara Puspita Dewi, S.Psi, M.Si, Psikolog, dan kegiatan di buka oleh Ketua LP2M UNM, yakni Prof.Dr. Ir. Bachrani A. Rauf, M.T, IPU yang diwakili oleh sekretaris LP2M. Kegiatan selanjutnya, yakni pemaparan materi pertama dengan tema Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di PT oleh Nur Azizah, Ph.D yang merupakan Tim Pendidikan Khusus Belmawa DIKTI. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa pendidikan inklusif harus dapat memastikan bahwa semua individu memiliki hak terhadap pendidikan dan pembelajaran yang aman dan berkualitas sepanjang hidupnya. Inklusi adalah sebuah proses yang membantu menghilangkan penghambat yang berpengaruh terhadap kehadiran, partisipasi dan pencapaian semua siswa. Bukan hanya tentang disabilitas dan kebutuhan khusus tetapi juga berkaitan latar belakang suku, agama, gender, status sosial, kemiskinan, dan lainnya.

Materi kedua terkait Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di PT yang dibawakan oleh Rofah, S.Ag., BSW, MA, PhD. yang merupakan Tim

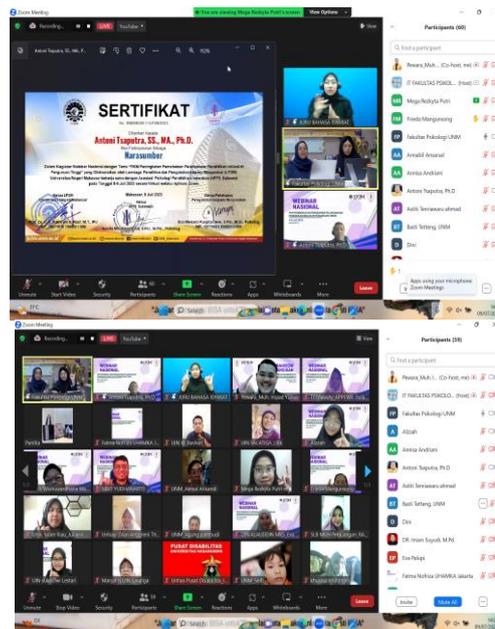
Ahli PLD UIN Sunan Kalijaga Jogja. Rofah menjelaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga Jogja telah memiliki PSLD (Pusat Studi Layanan Disabilitas) yang saat ini telah berubah nama menjadi PLD (Pusat Layanan Disabilitas) yang telah berdiri sejak tahun 2007. UIN Sunan Kalijaga Jogja merupakan Universitas pertama yang secara formal mendirikan unit layanan untuk disabilitas. Sejarah singkat dari berdirinya PLD di UIN Sunan Kalijaga Jogja disebabkan karena UIN Sunan Kalijaga selalu memiliki mahasiswa difabel dan mereka memiliki hak yang sama atas partisipasi yang sama tidak diakui. Berdasarkan hal tersebutlah membuat beberapa dosen tergerak untuk mencetuskan gagasan PLD di Perguruan Tinggi. Pada mulanya, UIN Sunan Kalijaga Jogja tidak mengetahui data mengenai mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Jogja sehingga dilakukan identifikasi manual, yakni membangun komunitas mahasiswa dan relawan.

Adapun materi ketiga dibawakan oleh narasumber Zubaidah Ningsih, S.Si., M.Phil, PhD. selaku Kepala UPT PSLD Universitas Brawijaya Malang dengan membawakan materi *Best Practices* Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Universitas Brawijaya Malang. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa di Universitas Brawijaya telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program untuk memastikan pendidikan inklusi di kampus. Berikut ini adalah beberapa inisiatif yang dilakukan, diantaranya: 1) Penerimaan Mahasiswa: Universitas Brawijaya menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus melalui jalur penerimaan yang inklusif, 2) Aksesibilitas Fisik: Universitas Brawijaya berupaya untuk menyediakan fasilitas dan lingkungan yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki mobilitas terbatas, 3) Dukungan Akademik: Universitas Brawijaya menyediakan layanan pendukung akademik bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus, 4) Kesadaran dan Pelatihan: Universitas Brawijaya juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai inklusi di antara staf, dosen, dan mahasiswa, dan 5) Kurikulum Inklusif: Universitas Brawijaya berusaha untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dari mahasiswa yang beragam.

Materi keempat yang merupakan materi terakhir pada hari pertama dipaparkan oleh dua pemateri, yaitu Maria Wirastari, S.Psi., M.Psi., Psikolog., yang merupakan alumni Difabel S1 dan Profesi Unika Atmajaya Jakarta. Selanjutnya Afif Husain Rasyidi S.Psi., yang merupakan Alumni *Low Vision* dari UB dan Ketua Komunitas Inklusi Nusantara. Kedua narasumber ini, menceritakan tentang pengalaman dan *how to survive* dengan kondisi yang telah dijalani.



**Gambar 3.** Pamflet kegiatan



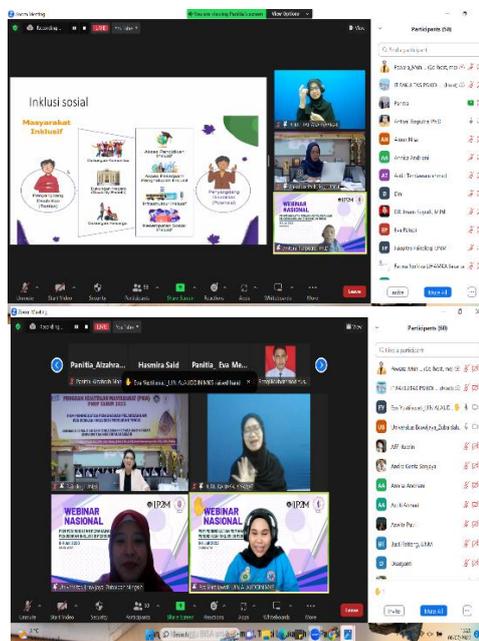
**Gambar 4.** Kegiatan hari pertama

Pelaksanaan kegiatan di hari kedua, dimulai pada pukul 09.00 WITA. Pemateri kelima, yakni Dr. Weny Savitry S. Pandia, M.Si., Psikolog yang merupakan Dosen Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta dan Ketua APPI Pusat dengan materi yang dibawakan Tantangan Pendidikan Inklusi di Fakultas Psikologi. Dalam pemaparannya, menjelaskan terkait sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama.

Pemateri keenam, yakni Unita Werdi Rahajeng, M.Psi., Psikolog dari Universitas Brawijaya dengan materi Peran Psikolog dalam UPT PSD. Unit Lavanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Materi ketujuh yakni Peran

Volunteer dalam pelaksanaan layanan inklusi dipaparkan oleh Ni Ketut Desi Ariani seorang Volunteer Universitas Brawijaya Awardee LPDP Mapro Psikologi UI. Universitas Brawijaya juga memiliki pendamping/volunteer tersendiri untuk mahasiswa difabel. Pendamping atau volunteer merupakan sebutan untuk para relawan yang bertugas untuk mendampingi mahasiswa difabel selama proses kuliah. Seluruh mahasiswa dapat menjadi pendamping/volunteer untuk mahasiswa difabel dan memiliki minat belajar yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi, sabar, ulet, dan konsisten serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diemban.

Pemateri terakhir, membahas mengenai Peluang Karir ABK dengan pemateri Antoni Tsaputra, SS, MA, PhD. Beliau menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak termasuk mendapatkan pekerjaan.



**Gambar 5.** Kegiatan hari kedua

Pada pelaksanaan webinar inklusi juga disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) selama 2 hari dan ada beberapa peserta teman tuli datang secara luring di lokasi kegiatan. Jumlah peserta pada hari pertama dan kedua berbeda. Namun, ada peserta yang tetap mengisi link pre-post tes, yaitu berjumlah 33 orang.

Berdasarkan hasil pemaparan dari para narasumber dalam kegiatan ini, dapat diketahui bahwa yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah paradigma dari masyarakat, khususnya pendidik yang masih belum memahami konsep inklusivitas secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah media pembelajaran yang tidak aksesibel untuk disabilitas tertentu, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk diakses oleh penyandang disabilitas, serta mitra dari

perusahaan atau instansi yang dapat menyediakan lapangan kerja untuk mahasiswa disabilitas yang telah lulus dari Perguruan Tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil studi literatur yang dilakukan oleh Muhibbin (2021) mengenai tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusi di perguruan tinggi adalah adanya paradigma negatif dari masyarakat mengenai kapabilitas mahasiswa difabel, manajemen pembelajaran dan SDM, dan aksesibilitas fasilitas kampus. Menurut Morgado, Cortes-Vega, Lopez-Gavira, Alvarez, dan Morina (2016) sebagian besar Perguruan tinggi belum menjadi tempat yang ramah bagi disabilitas dikarenakan sarana yang tidak mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, menurut Yusuf (2015) mahasiswa difabel masih dianggap oleh warga kampus sebagai individu yang perlu dikasihani dan merepotkan. Selain itu,

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan skor yang signifikan antara pre-test dan post-test. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan PKM ini tercapai dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi efektif:

- a. Peserta mengalami peningkatan pemahaman sebelum dan setelah kegiatan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi.
- b. Peserta mengungkapkan tentang pentingnya materi ini, khususnya untuk Perguruan Tinggi yang akan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan inklusi.
- c. Kegiatan semacam ini perlu dilakukan kembali dengan tema-tema yang lebih mendalam mengenai teknis pelaksanaan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainscow, M. (2002). *Understanding the Development of Inclusive Schools*. London: Taylor & Francis e-Library.
- Amalia, R. (2022). Persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus dalam konteks sekolah inklusi. *Elia: Journal Educational Learning and Innovation*, 2(1), 26-41.
- Isjianto. (2005). Riset sumber daya manusia cara praktis mengukur stres, kepuasan kerja, komitmen, loyalitas, motivasi kerja & aspek-aspek kerja karyawan lainnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maris, A. W. I., & Rahmi, I. (2022). Strategi lembaga pendidikan tinggi inklusif dalam meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa Difabel: Praktik Baik di Indonesia. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 1(1), 106-115.

- Morgado, B., Cortés-Vega, M. a . D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, A. (2016). Inclusive Education in Higher Education? *Journal of Research in Special Educational Needs*, 16, 639–642.
- Muhibbin, M.A. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(2).
- Prameswari, D. P., & Rahayu, T. S. (2020). Efektivitas model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dan numbered head together: kajian meta – analisis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 3(1), 202-210.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sastradiharja, E. E. J., Farizal, M. S., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan inklusi di perguruan tinggi: studi pada pusat kajian dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Alim: Jurnal of Islamic Education*, 2(1), 101-118.
- Yusuf, M. (2015). Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan. *JurnalIslamika*, 15(2), 163–172.